

## **Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BUMDES Di Kabupaten Bintan**

Muhammad Isa Alamsyahbana<sup>1</sup>, Afrizal<sup>2</sup>, Armansyah<sup>3</sup>  
STIE Pembangunan Tanjungpinang<sup>1</sup>, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang<sup>2</sup>, STIE  
Pembangunan Tanjungpinang<sup>3</sup>  
e-mail: [albanapengusahamuda@gmail.com](mailto:albanapengusahamuda@gmail.com)<sup>1</sup>, [afrizalkaharuddin@umrah.ac.id](mailto:afrizalkaharuddin@umrah.ac.id)<sup>2</sup>,  
[manchah494@gmail.com](mailto:manchah494@gmail.com)<sup>3</sup>

**Received: 13 March 2022; Revised: 02 April 2022; Accepted: 20 May 2022**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.2.345-356.2022>**

### **Abstrak**

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki cukup banyak BUMDes. Setidaknya BUMDes tersebut tersebar di 9 wilayah Kecamatan se-Kabupaten Bintan dengan berbagai macam jenis usaha. Dalam menjalankan operasionalnya, BUMDes sering mengalami kendala, dimana salah satunya yaitu kendala dalam membuat laporan keuangan BUMDes. Pelatihan di buat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengalaman kepada pengelola BUMDes dalam menyusun laporan keuangan BUMDes berdasarkan Permen No 3 Tahun 2021. Selain itu, peserta juga diajak untuk mencoba menggunakan aplikasi akuntansi berbasis internet bernama Si Apik sebagai alternatif pembuatan laporan keuangan berbasis teknologi. Pelatihan diikuti dengan antusias dan response yang baik dari peserta dan diharapkan acara seperti ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh dinas terkait dan melibatkan banyak akademisi maupun praktisi.

### **Kata Kunci**

Laporan Keuangan BUMDes, Permen No 3 Tahun 2021, Si Apik, Dinas PMD Kabupaten Bintan

### **Pendahuluan**

Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah kabupaten yang terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Daerah ini memiliki basis ekonomi kemaritiman dan pariwisata, dimana salah satu upaya dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Setiap desa diharapkan mampu untuk mengembangkan berbagai unit usaha agar dapat menjadi sumber pendapatan desa dan mengangkat perekonomian masyarakat sekitar desa.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan, terdapat 9 wilayah BUMDes yang tergolong aktif dalam menjalankan usahanya. Masing-masing daerah memiliki beberapa unit usaha dengan keunggulan masing-masing. Sebagian telah tergolong sebagai BUMDes perintis, pemula, berkembang dan maju. Untuk data lengkapnya, dapat dilihat dalam tabel berikut:



**Tabel 1. Data BUMDes Kabupaten Bintan**

No	Kecamatan	Nama BUMDes	Status
1	Teluk Bintan	Bina Karya (Desa Tembeling)	Pemula
2	Teluk Bintan	Karya Bersama (Desa Pengujan)	Pemula
3	Teluk Bintan	Tri Mufakat Bintan (Desa Bintan Buyu)	Perintis
4	Teluk Bintan	Mitra Bahari (Desa Pangkil)	Pemula
5	Teluk Bintan	Penaga Maju Bersama (Desa Penaga)	Perintis
6	Bintan Utara	Jaya Gemilang (Desa Lancang Kuning)	Pemula
7	Telok Sebong	Anugrah Ekang (Desa Ekang Anculai)	Maju
8	Telok Sebong	Maju Bersama (Desa Berakit)	Pemula
9	Telok Sebong	Bina Bersama (Desa Sebong Lagoi)	Pemula
10	Telok Sebong	Sebong Perekh Gemilang (Desa Sebong Perekh)	Perintis
11	Telok Sebong	Pengudang Jaya (Desa Pengudang)	Berkembang
12	Telok Sebong	Bintan Lestari (Desa Sri Bintan)	Perintis
13	Seri Kuala Lobam	Mitra Perdana (Desa Teluk Sasah)	Maju
14	Seri Kuala Lobam	Seri Kuala Raya (Desa Kuala Sempang)	Perintis
15	Seri Kuala Lobam	Dendang Betuah (Desa Busung)	Pemula
16	Gunung Kijang	Sahabat (Desa Malang Rapat)	Berkembang
17	Gunung Kijang	Bina Sejahtera (Desa Teluk Bakau)	Pemula
18	Gunung Kijang	Gemilang (Desa Gunung Kijang)	Pemula
19	Mantang	Karya Bersama (Desa Mantang Lama)	Pemula
20	Mantang	Mantang Baru (Desa Mantang Baru)	Perintis
21	Mantang	Mantang Sejahtera (Desa Mantang Besar)	Pemula
22	Bintan Pesisir	Kurnia Jaya (Desa Numbing)	Pemula
23	Bintan Pesisir	Kelong Berwirausaha (Desa Kelong)	Pemula
24	Bintan Pesisir	Mapur Mandiri (Desa Mapur)	Perintis
25	Bintan Pesisir	Maritim Jaya (Desa Air Glubi)	Pemula
26	Toapaya	Mitra Karya Sejahtera (Desa Toapaya Selatan)	Berkembang
27	Toapaya	Sukses Jaya Gemilang (Desa Toapaya)	Pemula
28	Toapaya	Three Bhakti Karya (Desa Toapaya Utara)	Pemula
29	Tambelan	Sehati (Desa Kampung Hilir)	Maju
30	Tambelan	Sejiwa (Desa Pulau Pinang)	Perintis
31	Tambelan	Harapan Kita (Desa Kukup)	Pemula
32	Tambelan	Tunas Jaya (Desa Batu Lepuk)	Pemula
33	Tambelan	Bangkit Kembali (Desa Mentebung)	Pemula
34	Tambelan	Maju Melayu (Desa Kampung Melayu)	Berkembang
35	Tambelan	Perjuangan Jaya (Desa Pulau Pengikik)	Perintis

**Sumber:** Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan, 2022

BUMDes merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut dengan tujuan memperkuat perekonomian desan dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut (Sujarweni, 2020). Sedangkan definisi desa sendiri menurut Permen No 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1

didefinisikan bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sujarweni, 2015).

Adapun beberapa ciri dari BUMDes menurut (Taufik et al., 2018), yaitu:

1. Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa
2. Modal bersama yakni bersumber dari desa dan masyarakat, dilakukan dengan cara penyetaraan modal.
3. Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini di kontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.
4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.
6. Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

Permasalahan umum yang dialami oleh BUMDes, biasanya seputar permasalahan sumber daya manusia yang terbatas, motivasi dan inovasi produk, manajemen keuangan dan keorganisasian, infrastruktur desa, dan pembuatan laporan keuangan sesuai standart yang berlaku umum. Dari beberapa permasalahan tersebut, kami sebagai Dosen yang menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dimana salah satunya adalah melakukan Pengabdian kepada masyarakat diminta untuk membuat suatu pelatihan guna peningkatan kualitas pengelolaan keuangan BUMDes di Kabupaten Bintan. Hal ini menjadi penting, karena selain permasalahan terbatasnya sumber daya manusia pengelola BUMDes dalam membuat laporan keuangan, masalah lainnya yaitu munculnya aturan baru yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan / atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama. Konsekuensi dengan adanya aturan tersebut, salah satunya yaitu adanya format baru dalam penyusunan laporan keuangan BUMDes, sehingga pengelola BUMDes perlu diberikan pelatihan agar dapat memahami dan melaksanakan sesuai format baru tersebut.

### **Metode Pelaksanaan**

Metode Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Bintan diawali dengan adanya rapat bersama tenaga Ahli dan perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan, guna membicarakan tentang metode penyampaian dan pokok-pokok topik yang akan di bahas selama pelaksanaan pelatihan tersebut. Selain itu, juga dibicarakan tentang siapa saja peserta yang akan diundang serta penentuan lokasi dan waktu pelaksanaan pelatihan. Berdasarkan hasil diskusi, disepakati bahwa pelatihan akan mengundang seluruh pengurus BUMDes di Kabupaten Bintan sejumlah 35 BUMDes, mengundang bendahara sebagai pengelola dan pembuat laporan keuangan BUMDes serta materi yang

akan disampaikan berkaitan tentang penyusunan laporan keuangan berdasarkan Permen Nomor 3 Tahun 2021, pengenalan aplikasi keuangan serta motivasi pengembangan usaha.

**Gambar 1. Diskusi Perencanaan Pelatihan bersama Dinas PMD Bintan dan Tenaga Ahli**



**Sumber:** Pengabdi, 2022

**Hasil dan Pembahasan**

Pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan BUMDes di Kabupaten Bintan dilaksanakan pada Gedung Serba Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bintan di Bintan Buyu. Adapun peserta yang hadir tidak hanya pengelola yang bertugas sebagai bendahara, melainkan beberapa ketua BUMDes ikut hadir bersama. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 hari, dengan penyajian pelatihan berupa presentasi, latihan membuka worksheet, simulasi aplikasi akuntansi berbasis online dan sesi tanya jawab. Kegiatan diawali dengan pembukaan acara secara langsung oleh kepada Dinas PMD Bintan, yaitu Bapak Ronny Kartika, S.STP. MM., yang kemudian dilanjutkan pemaparan materi oleh Pak Afrizal, S.IP.,M.Si., selaku narasumber 1, guna membahas motivasi pengembangan BUMDes dan manajemen keorganisasi BUMDes.

Setelahnya, dilanjutkan dengan pemaparan kedua oleh Muhammad Isa Alamsyahbana, SE.M.Ak., dan Armansyah, SE.MM., mengenai penyusunan format laporan keuangan berdasarkan Permen Nomor 3 Tahun 2021, pengenalan aplikasi akuntansi berbasis internet, yaitu aplikasi Si Apik dan tanya jawab bersama peserta pelatihan.



**Hasil**

**Tabel 2. Format Laporan Laba Rugi**

Kode Akun	Nama Akun	
<b>04.00.00</b>	<b>Pendapatan</b>	
04.01.00	Pendapatan Usaha	
04.01.01	Pendapatan	
	<b>Total Pendapatan</b>	
<b>05.00.00</b>	<b>Harga Pokok Penjualan</b>	
05.01.00	Harga Pokok Penjualan	
05.01.01	Harga Pokok Penjualan	
05.02.00	Harga Pokok Barang Dagang	
05.02.01	Pembelian	
	<b>Total Harga Pokok Penjualan</b>	
		<b>Laba Kotor (Total Pendapatan - Total Harga Pokok Penjualan)</b>
06.00.00	BIAYA	
06.01.00	Biaya Usaha	
06.01.01	Biaya Umum Dan Administrasi	
	Biaya Promosi	
	<b>Total Biaya</b>	
		<b>Total Pendapatan Usaha (Total Laba Kotor - Total Biaya)</b>
07.00.00	Pendapatan Lainnya	
07.01.00	Pendapatan Diluar Usaha	
07.01.01	Pendapatan Lainnya	
	<b>Total Pendapatan Lainnya</b>	
08.00.00	Biaya Lainnya	
08.01.00	Biaya Diluar Usaha	
08.01.01	Biaya Lainnya	
	<b>Total Biaya Lainnya</b>	

		<b>Total Pendapatan Diluar Usaha (Total Pendapatan Lainnya - Total Biaya Lainnya)</b>
		<b>Laba/Rugi Bersih (Total Pendapatan Usaha + Total Pendapatan Diluar Usaha)</b>

**Sumber:** Permen Nomor 3 Tahun 2021

**Tabel 3. Perubahan Modal**

<b>Modal (Awal) per ... (tanggal)</b>		
<b>Modal (Tambahan) untuk Tahun yang berakhir ... (tanggal)</b>		
Saldo Laba Ditahan per ... (tanggal)		
Saldo Laba Tahun Berjalan untuk Tahun yang berakhir ... (tanggal)		
Dividen untuk Tahun yang berakhir ... (tanggal) 0,00		
<b>Saldo Laba Ditahan per ... (tanggal)</b>		
<b>Modal Akhir</b>		

**Sumber:** Permen Nomor 3 Tahun 2021

**Tabel 4. Format Laporan Neraca**

Akun	Uraian	Nilai
01.00.00	<b>ASET</b>	
01.01.00	<b>ASET LANCAR</b>	
01.01.01	Kas	
1.1.01.01 -	Kas besar	
1.1.01.02 -	Pretty Cash	
01.01.02	Bank	
1.1.02.01 -	Bank ...	
1.1.02.02 -	Kas besar	
01.01.03	Piutang	
1.1.01.03 -	Deposit Tiket	
1.1.03.01 -	Piutang Usaha	
1.1.03.03 -	Piutang Karyawan	
01.01.05	Persediaan	
1.1.05.01 -	Persediaan Barang Dagang	
01.01.06	Perlengkapan	
1.1.06.01 -	Perlengkapan Kantor	
01.01.07	Pajak Dibayar Dimuka	
1.1.07.01 -	Pajak PPN Masukan	
1.1.07.02 -	Pajak Dibayar Dimuka PPh23	



01.01.08	Biaya Dibayar Dimuka	
1.1.08.02 -	Uang Muka/Pinjaman Kepada Karyawan	
1.1.08.03 -	Uang Muka Pembelian	
1.1.08.04 -	Cash Advance	
1.1.08.06 -	Cashbon/Pinjaman	
01.02.00	ASET TIDAK-LANCAR	
01.02.01	Aset Tetap	
1.2.01.02 -	Bangunan	
1.2.01.03 -	Kendaraan	
1.2.01.05 -	Peralatan Kantor	
1.2.01.07 -	Akumulasi Penyusutan Bangunan	
1.2.01.08 -	Akumulasi Penyusutan Kendaraan	
1.2.01.10 -	Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	
01.02.04	KITCHEN MACHINERY	
1.2.04.01 -	Freezer	
	<b>TOTAL ASET</b>	
02.00.00	<b>KEWAJIBAN</b>	
02.01.00	KEWAJIBAN LANCAR	
02.01.01	Utang	
2.1.01.01 -	Utang Usaha	
02.01.02	Utang Pajak	
2.1.02.01 -	Utang PPN Keluaran	
2.1.02.02 -	Utang PPh 21	
2.1.02.04 -	Utang PPh 23	
02.01.03	Biaya Terutang (Masih Harus Dibayar)	
2.1.03.01 -	Utang Gaji/Upah	
2.1.03.02 -	Utang BPJS Kesehatan	
2.1.03.06 -	Utang Deposit	
02.01.04	Utang Lainnya	
2.1.04.04 -	Pendapatan Diterima Dimuka	
2.1.04.05 -	Utang Lainnya	
	<b>TOTAL KEWAJIBAN</b>	
03.00.00	<b>EKUITAS</b>	
03.01.00	EKUITAS	
03.01.01	Modal	
3.1.01.01 -	Modal Disetor	
3.1.01.02 -	Utang Direksi	
03.01.02	Saldo Laba	
3.1.02.01 -	Saldo Laba Ditahan	



3.1.02.02	Saldo Laba Tahun Berjalan	
	<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL</b>	

**Sumber:** Permen Nomor 3 Tahun 2021

**Tabel 5. Format Laporan Arus Kas**

<b>A. Arus Kas Dari Operasional</b>		
<b>Penerima Kas Dari Pelanggan</b>		
4.1.01.01 -	Penjualan	
4.1.01.02 -	Potongan Penjualan	
4.1.01.03 -	Retur Penjualan	
1.1.03.01 -	Kenaikan Pada Piutang Usaha	
2.1.02.01 -	Kenaikan Pada Utang PPN Keluaran	
2.1.04.04 -	Kenaikan Pada Pendapatan Diterima Dimuka	
1.1.07.04 -	Kenaikan Pada Pajak Dibayar Dimuka Pph 23	
	<b>Total Penerima Kas Dari Pelanggan</b>	
<b>Kas Yang Dibayarkan Ke Vendor</b>		
2.1.01.01 - Kenaikan Pada Utang Usaha		
1.1.07.01 - Kenaikan Pada Pajak Ppn Masukan		
5.1.01.01 - Harga Pokok Penjualan		
5.2.01.01 - Pembelian		
	<b>Total Kas Yang Dibayarkan Ke Vendor</b>	
<b>Kas Yang Dibayarkan Untuk Pajak</b>		
1.1.01.01 - Penurunan Pada Kas Besar		
	<b>Total Kas Yang Dibayarkan Untuk Pajak</b>	
<b>Kas Yang Dibayarkan Untuk Beban Pokok Penjualan Operasional</b>		
	<b>Total Kas Yang Dibayarkan Untuk Beban Pokok Penjualan Operasional</b>	





<b>Kas Yang Dibayarkan Untuk Biaya Operasional</b>		
6.1.01.01 -	Biaya Gaji	
6.1.01.06 -	Biaya Insentif Dan Bonus	
6.1.01.08 -	Biaya Makan	
6.1.01.09 -	Biaya Medis	
6.1.01.10 -	Biaya Perjalanan Dinas	
6.1.01.11 -	Biaya Transportasi, Bbm, Toll Dan Parkir	
6.1.01.12 -	Biaya Listrik	
6.1.01.13 -	Biaya Gas	
6.1.01.16 -	Biaya Keamanan Dan Kebersihan	
6.1.01.18 -	Biaya TATK Dan Fotocopy	
6.1.01.19 -	Biaya Perlengkapan	
6.1.01.22 -	Biaya Servis Dan Pemeliharaan	
6.1.01.24 -	Biaya Entertainment Dan Representasi	
6.1.01.33 -	Biaya Operasional Lainnya	
6.1.01.34 -	Biaya Penyusutan Bangunan Kantor	
6.1.01.35 -	Biaya Penyusutan Kendaraan	
6.1.01.36 -	Biaya Penyusutan Peralatan Kantor	
1.2.01.08 -	Kenaiakan Pada Akumulasi Penyusutan Kendaraan	
1.2.01.10 -	Kenaiakan Pada Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	
	<b>Total Kas Yang Dibayarkan Untuk Biaya Operasional</b>	
<b>Kas Yang Dibayarkan/Diterima Lainnya</b>		
7.1.01.04 -	Pendapatan Diluar Usaha Lainnya	
7.1.01.02 -	Laba Atas Selsish Kurs	
8.1.01.03 -	Rugi Atad Selisih Kurs	
	<b>Total Kas Yang Dibayar/Diterima Lainnya</b>	
	<b>Total Arus Kas Dari Operasional</b>	
<b>B. Arus Kas Dari Investasi</b>		
<b>Kas Dari Investasi</b>		
1.2.01.03 -	Kenaikan Pada Kendaraan	

1.2.01.05 - Kenaikan Pada Peralatan Kantor		
	Total Kas Dari Investasi	
	Total Arus Kas Dari Investasi	
<b>C. Arus Kas Dari Pendanaan</b>		
Kas Dari Pendanaan		
3.1.01.01 - Kenaikan Pada Modal Disetor		
	Total Kas Dari Pendanaan	
	Total Arus Kas Dari Pendanaan	
	Kas Pada Saat Awal Periode	
	Total Kas Yang Diterima	
	Kas Pada Saat Akhir Saldo	

**Sumber:** Permen Nomor 3 Tahun 2021

### **Pembahasan**

Berdasarkan format yang telah diberikan dalam Permen Nomor 3 Tahun 2021, dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Format laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pengelola BUMDes setidaknya mencakup laporan laba-rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca (laporan posisi keuangan) dan laporan arus kas.
2. Laporan laba rugi merupakan laporan yang berisikan kumpulan pendapatan-pendapatan usaha yang dikurangkan dengan berbagai macam biaya-biaya, dimana nanti hasil akhirnya akan menunjukkan suatu nilai posisi keuangan BUMDes, apakah BUMDes mengalami laba ataukah rugi. Contoh format laba -rugi dalam Permen Nomor 3 Tahun 2021 merupakan contoh format pada BUMDes berbasis manufaktur. Sehingga bagi BUMDes yang bergerak di bidang perdagangan maupun jasa dapat menyesuaikan mengenai komponen pendapatan dan biaya yang dimiliki oleh BUMDes masing-masing.
3. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menunjukkan perubahan struktur modal setelah BUMDes telah menjalankan 1 siklus akuntansi atau setelah munculnya laporan laba -rugi. Laporan perubahan modal BUMDes menjadi penting, karena dalam penyusunan modal, akan ada kebijakan yang dilakukan, apakah hasil usaha berupa laba akan dimasukkan kedalam komponen penambah modal kerja ataukah akan dibagikan sebagai bentuk keuntungan bersama. Sama seperti halnya laporan laba rugi, contoh format laporan perubahan modal menurut Permen Nomor 3 Tahun 2021 merupakan format laporan pada BUMDes berbasis manufaktur, sehingga BUMDes yang berada pada jenis jasa maupun perdagangan dapat menyesuaikan sesuai akun yang dimiliki.
4. Laporan Neraca atau lebih dikenal saat ini dengan sebutan Laporan Posisi Keuangan merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu BUMDes, dimana akan disajikan seluruh aktiva berupa asset lancar dan asset tetap BUMDes dan seluruh passiva berupa komponen hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang)

dan modal. Dari laporan ini, akan terlihat jelas bagaimana kondisi keuangan suatu BUMDes, sehingga pengelola dapat melakukan langkah strategis jika dilihat ada beberapa bagian yang terlalu besar ataupun terlalu kecil nilai nominalnya. Selain itu, antara nilai akhir atau total aktiva dan total passiva harus sama besar. Sama besar dalam nilai inilah yang disebut dengan *balance*. Mengenai komponen akun penyusun laporan neraca, masih menggunakan format BUMDes berbasis manufaktur, sehingga nanti bagi BUMDes yang memiliki jenis usaha jasa maupun dagang dapat menyesuaikan sesuai dengan jenis usaha masing-masing.

5. Dan laporan terakhir adalah arus kas, yang merupakan laporan yang menggambarkan kemana aliran uang masuk dan keluar dari suatu BUMDes.
6. Adapun aplikasi akuntansi yang dikenalkan kepada pengurus BUMDes Kabupaten Bintang, yaitu aplikasi Si Apik. Aplikasi Si Apik merupakan aplikasi berbasis android dan PC yang dapat digunakan secara gratis. Diciptakan oleh Bank Indonesia untuk membantu berbagai macam UKM, baik kelas mikro, kecil, hingga menengah. Aplikasi ini dirasa masih cukup relevan untuk digunakan oleh beberapa pengelola BUMDes, terutama bagi BUMDes yang masih berstatus perintis, pemula hingga berkembang. Sedangkan BUMDes yang telah maju, masih bisa menggunakan aplikasi ini ataupun aplikasi akuntansi lainnya yang berbayar sesuai dengan kebutuhan dari pengelola BUMDes. Dalam kesempatan ini, kami mengajak peserta untuk melakukan simulasi dan registrasi akun Si Apik secara bersama-sama.

**Gambar 2. Logo Si Apik**



**Gambar 3. Dokumentasi Saat Pelatihan**



### Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa BUMDes yang berada di kabupaten Bintan sangat antusias dan membutuhkan berbagai macam pelatihan seperti yang telah dilaksanakan saat ini. Hal ini terlihat dari response peserta selama sesi diskusi berlangsung. Kami sebagai akademisi juga ikut berterima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk berbagi kepada pengelola BUMDes Kabupaten Bintan dan berharap agar acara seperti ini dapat tetap berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Sujarweni, V. W. (2015). *AKUNTANSI DESA - PANDUAN TATA KELOLA KEUANGAN DESA*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V. W. (2020). *Akuntansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Taufik, A., Hidayat, A. T., Pujiati, L., Hidyati, N., Hendrawan, S. A., & Suprpto, S. (2018). PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) LESTARI DESA BANDUNG KECAMATAN DIWEK JOMBANG. *COMVICE*, 2(1), 15–20.